

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SUB UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKUS HENDRATNO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622395

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 25.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m²/30 m² di SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA AFX12U21008 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI KAWASAKI LX150G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.150.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 65.650.000

III. HUTANG Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 65.650.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.